

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DESA
(STUDI DI TERBANGGI SUBING KECAMATAN GUNUNG SUGIH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

Skripsi

Oleh

MELLY FEBRIAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DESA
(STUDI DI TERBANGGI SUBING KECAMATAN GUNUNG SUGIH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

Oleh

MELLY FEBRIAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

ABSTRAK

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (STUDI DI TERBANGGI SUBING KECAMATAN GUNUNG SUGIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Oleh

MELLY FEBRIAN

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini di analisis menggunakan teori dari uphoff dan cohen yaitu terdapat 4 ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan suatu program: partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat dan evaluasi. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yaitu masyarakat Desa Terbanggi Subing mampu berkontribusi dengan baik dan antusias dalam menyampaikan pendapatnya diforum musyawarah melalui perwakilan dari rt atau rw setempat, meskipun ada sedikit masyarakat yang kurang aktif dalam mengikuti rapat atau musyawarah desa, dalam proses pelaksanaan APBDes, masyarakat Desa Terbanggi Subing berkontribusi dengan tenaga, meskipun ada yang bersikap cuek karena menganggap sudah banyak yang membantu dan tidak adanya pemberitahuan dalam pelaksanaan seperti perbaikan jalan. Partisipasi dalam pengambilan manfaat masyarakat dapat merasakan jalan lintas yang tidak berlobang dan membuat masyarakat nyaman akan perubahan yang terjadi. Pemerintah Desa Terbanggi Subing sendiri belum mengadakan musyawarah atau forum untuk evaluasi program dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang melibatkan masyarakat desa.

Kata Kunci : Partisipasi, Partisipasi masyarakat, Pengelolaan APBDes.

ABSTRACT

COMMUNITY PARTICIPATION IN VILLAGE EXPENDITURE REVENUE BUDGET MANAGEMENT (STUDY IN TERBANGGI SUBING, GUNUNG SUGIH DISTRICT, CENTRAL LAMPUNG DISTRICT)

By

MELLY FEBRIAN

Community participation not only involves the community in making decisions in every development program, but the community is also involved in identifying problems and potentials that exist in the community. This research aims to determine community participation in the preparation of the Terbanggi Subing Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), Gunung Sugih District, Central Lampung Regency. This research was analyzed using the theory of Uphoff and Cohen, namely that there are 4 scopes of participation in implementing a program: participation in decision making, implementation, benefit taking and evaluation. The method used in this research is descriptive qualitative, with data collection techniques namely through interviews, observation and documentation. The results of the research show that in terms of indicators of community participation in decision making, the people of Terbanggi Subing Village are able to contribute well and enthusiastically in conveying their opinions in deliberation forums through representatives from the local RT or RW, although there are a few people who are less active in participating in village meetings or deliberations. In the process of implementing the APBDes, the people of Terbanggi Subing Village contributed their energy, although some were indifferent because they thought that many people had helped and there was no notification regarding implementation such as road repairs. Participation in taking community benefits can provide a sense of a path that is not full of holes and make people comfortable with the changes that are occurring. The Terbanggi Subing Village Government itself has not yet held a deliberation or forum to evaluate programs from the Village Revenue and Expenditure Budget involving village communities...

Keywords: Participation, Community participation, APBDes Management.

Judul Skripsi

**: PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DESA (STUDI DI TERBANGGI
SUBING KECAMATAN GUNUNG SUGIH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

Nama Mahasiswa

: Melly febrian

Nomor Pokok Mahasiswa : **1716021074**

Program Studi

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP. 196112181989021001

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP. 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**



Penguji

: **Darmawan Purba, S.IP., M.IP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 November 2023**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan Tinggi lain.
2. Karya Tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji
3. Dalam Karya Tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Desember 2023
Yang Membuat Pernyataan



Melly Febrian
NPM 1716021074

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Melly Febrian lahir di Sidorejo pada tanggal 18 Februari 1999. Penulis adalah anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Alm. Anton Silalahi dan Ibu Lomsil Ruliana Br. Sidabukke. Penulis memiliki dua saudara laki-laki bernama Mulia Luther dan Ferdinand Abednego serta dua saudara perempuan yang bernama Riris Yohana dan Novelin.

Jenjang pendidikan penulis di mulai dari Pendidikan Dasar (SD) diselesaikan di SDN 1 Terbanggi Subing pada tahun 2011, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 4 Gunung Sugih pada Tahun 2014, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Terbanggi Besar pada Tahun 2017. Tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN.

MOTTO

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.”

(Amsal 23:18)

Jangan mudah untuk takut, kesempatan tidak datang dua kali.

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Karya Ilmiah sederhana ini kepada
sosok luar biasa Ibu dan Alm.Bapak Tercinta
Begitu banyak cinta kasih yang aku terima sebagai anak, begitu kurang
rasanya perjuanganku untuk membalasnya.

Betapa besar pengorbanan dan doa yang bapak ibu lakukan untuk anakmu.
Terimakasih untuk semua keirngat dan air mata yang kau teteskan untuk
puterimu.

Kakakku tersayang Riris Yohana dan Novelin. Abangku
Tersayang Mulia Luther dan Ferdinand AbedNego.
Abang Iparku terkasih Nando Siregar Keponakanku
tersayang Shael Beristian Siregar.

Terimakasih untuk semua yang mendukung selesainya skripsi ini. Semoga
berkat dan kasih sayang Tuhan selalu menyertai kita semua

Almamater Tercinta

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas hikmat dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (STUDI DI TERBANGGI SUBING KECAMATAN GUNUNG SUGIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH).”** dapat diselesaikan.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Serta terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, tanpa bantuan dari berbagai pihak mustahil skripsi ini dapat terwujud dengan baik. Oleh karena itu penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini diantaranya:

1. Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik, terimakasih atas penyertaan kasihMu sepanjang hari, setiap waktu dan setiap pekerjaan yang di lalui.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Roby Cahyadi Kurniawan, S.IP, M.A. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terima kasih atas ilmu yang diberikan selama menempuh perkuliahan, semoga bapak selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Pembimbing. Terima kasih atas bantuannya selama menempuh perkuliahan, serta ilmu yang diberikan. Semoga Tuhan selalu melindungi setiap langkah Bapak dan semoga selalu diberikan Kesehatan. Dan yang telah banyak membantu selama proses bimbingan skripsi ini. Terimakasih bapak telah bersedia membimbing, memberi masukan, sarannya serta memotivasi agar penulis tidak menyerah dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga bapak selalu sehat dan semoga setiap langkah bapak selalu dilindungi Tuhan YME.
7. Bapak Darmawan Purba, M.IP. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan Dosen Penguji. Terimakasih atas bantuannya selama menjalani kehidupan di kampus dan terimakasih atas masukan - masukan demi keberhasilan penyelesaian skripsi ini dengan sebaik - baiknya. Semoga setiap langkah Bapak selalu dalam lindungan Tuhan YME.
8. Dosen-dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
9. Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Mba Shela, Bang Puput, dan juga Mas Andi. Terima kasih telah membantu dalam hal administrasi perkuliahan dari awal hingga akhir. Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
10. Kedua orang tua yang tercinta, Ibu Lomsy Ruliana Br. Sidabukke dan Alm. Bapak Anton Silalahi, untuk semua doa, dukungan, kesabaran dan selalu berusaha memberikan yang terbaik agar aku dapat menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi dan mendapat gelar sarjana.

Terima kasih saja tidak cukup untuk membalas semua doa dan dukungan demi menjaga dan menjadikanku seperti sekarang, semoga berkat Tuhan melimpah atas Bapak dan Ibu, di berikan Kesehatan selalu sampai mampu mengantarkan Putera-Puteri mencapai kesuksesan dalam hidupnya.

11. Kakakku Riris Yohana dan Abang Iparku Nando Siregar juga keponakan tersayang ku Shael Beristian Siregar dan kakakku Novelin, juga abangku Mulia Luther dan Ferdinand AbedNego. Yang telah membantu dan memberikan semangat dalam menjalani skripsi ini. Terimakasih telah selalu mendukungku dari awal hingga tahap ini. Semoga kita bisa sukses serta dapat membanggakan kedua orang tua dan semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa.
12. Teman susah dan mainku dari awal perkuliahan sampai sekarang, Rokiah, Agung Dwitha, dan Silvany Claudia. Semoga kita bisa berteman sampai seterusnya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semoga apapun yang kita lakukan selalu dilancarkan. Daniel Silalahi, teman yang selalu direpotkan dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih ya, sukses selalu kedepannya dan Jimmi H. Purba, teman yang setia menemani dari awal perkuliahan sampai sekarang, Terimakasih banyak, hal baik selalu datang kepadamu. Serta anak asrama gia yang lama dan yang baru, terimakasih sudah memberikan senyuman.
13. Keluarga Besar Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017 yang nama-namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih teman-teman untuk semua bantuan dan dukungannya semoga apa yang telah kita lalui selama menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan menjadi pengalaman dan berguna bagi kita kedepannya. Semangat untuk kalian yang masih memperjuangkan toga, dan sukses selalu untuk kita semua. Semoga sukses selalu kawan-kawan seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2017.
14. Teman-teman selama PKL di DPRD Provinsi Lampung. Irfan, Ridho, Satria dan Bang Sani. Terimakasih atas kerjasama dan pengalamannya selama PKL di DPRD Kota Bandar Lampung. Semoga sukses selalu untuk kita semua.
15. Teman-teman KKN di Desa Ketapang, Kecamatan Limau, Kabupaten

Tanggamus. Bang Edo, Bang Sandi, Bunga, Puspita, Puput, Mutia dan Ibu lurah serta ibu cahaya sebagai tuan rumah kami selama pelaksanaan KKN, Kepala Desa juga para staff Kantor Desa Ketapang dan juga warga desa beserta anak-anak SD Ketapang. Terimakasih atas kerjasamanya, pengalaman dan juga kenangan yang tidak akan pernah terlulang lagi, meski banyak rintangan dan tantangan tetapi tetap berjalan lancar. Semoga sukses selalu untuk kita semua dan selalu dilindungi oleh Tuhan YME.

16. Narasumber penelitian, terimakasih untuk semua narasumber yang telah memberikan informasi dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan kalian kepada penulis.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Penulis berharap Tuhan YME berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 12 Desember 2023

Penulis

Melly Febrian

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang dan Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Tentang Partisipasi	6
2.1.1 Definisi Partisipasi	6
2.2 Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat	7
2.2.1 Definisi Partisipasi Masyarakat	7
2.2.2 Jenis-Jenis Partisipasi Masyarakat	8
2.2.3 Faktor Faktor yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat	11
2.3 Pemerintahan Desa	12
2.3.1 Konsep Pemerintahan Desa	12
2.3.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	14
2.4 Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)	16
2.4.1 Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Desa	17
2.4.2 Pendapatan Desa	17
2.4.3 Belanja Desa	18
2.4.4 Pembiayaan Desa	18
2.5 Kerangka Pikir	21
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian.....	22
3.2 Fokus Penelitian	22
3.3 Lokasi Penelitian	23
3.4 Informan	23
3.5 Jenis Data	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data	24
3.7 Teknik Pengolahan Data.....	25
3.8 Teknik Analisis Data	25
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	26
IV. GAMBARAN KAMPUNG DESA TERVBANGGI SUBING	
4.1. Sejarah Desa Terbanggi Subing	28
4.1.1. Keadaan Geografis Desa Terbanggi Subing	29
4.1.2. Demografi dan Monografi Wilayah Administrasi Kampung	

Terbanggi Subing	30
4.2. Kondisi Sarana Prasarana Kampung Terbanggi Subing	36
4.2.1. Daftar Pemerintahan Kampung Terbanggi Subing	38
4.2.2. Daftar Kelembagaan Kampung	39

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Dan Pembahasan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pengelolaan APBDes di Desa Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.	45
5.1.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan	52
5.1.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan	56
5.1.3 Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat	60
5.1.4 Partisipasi Dalam Evaluasi	61

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	62
6.2 Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Informan Peneliti.	23
Tabel 2. Nama Kepala Desa Terbanggi Subing Per Periode	29
Tabel 3. Sumber Daya Manusia Kampung Terbanggi Subing	31
Tabel 4. Jumlah Penduduk Per Dusun Kampung Terbanggi Subing	32
Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis/Suku	32
Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	33
Tabel 7. Jenis Mata Pencaharian/Pekerjaan masyarakat kampung.....	33
Tabel 8. Jumlah Penduduk Kampung Terbanggi Subing Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan	34
Tabel 9. Kondisi Sarana Prasarana Kesehatan Kampung terbanggi Subing.....	34
Tabel 10. Kondisi Penduduk Pengguna Air Minum Kampung Terbanggi Subing.....	34
Tabel 11. Jenis dan Jumlah Pemeluk Agama Kampung Terbanggi Subing	35
Tabel 12. Jenis dan Jumlah Sarana Ibadah Kampung Terbanggi Subing	35
Tabel 13. Daftar Jenis dan Jumlah Sarana Prasarana Terbanggi di Kampung Terbanggi Subing	36
Tabel 14. Sumber Daya Pembangunan	37
Tabel 15. Daftar Nama Aparatur Pemerintahan Kampung Terbanggi Subing	38
Tabel 16. Jenis dan Jumlah Kelembagaan Masyarakat Kampung Terbanggi Subing.....	39
Tabel 17. Pengurus Kelembagaan BPK	40
Tabel 18 Pengurus Kelembagaan Rukun Tetangga (RT)	40
Tabel 19. Pengurus Kelembagaan PKK.....	42
Tabel 20. Pengurus Kelembagaan LPMK.....	43
Tabel 21. Pengurus Kelembagaan Karang Taruna.....	43
Tabel 22. Simulasi Kegiatan APBDes	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir	22
Gambar 1. Wawancara dengan Ibu Puspa Dewi sebagai Sekretaris Desa Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah.....	68
Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Supardi sebagai Kasi Pemerintahan Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah.....	68
Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Kusdianto sebagai Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah.....	69
Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Mian Sebagai Masyarakat Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah.....	69
Gambar 5. Wawancara dengan Ibu Leni Sebagai Masyarakat Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah	70
Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Parulian Sebagai Masyarakat Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah.....	70
Gambar 7. Peraturan Kampung Terbanggi Subing Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung Terbanggi Subing Periode 2021-2026.....	71
Gambar 8. Berita Acara Musyawarah Kampung Terbanggi Subing 2022.	72
Gambar 9. Berita Acara Musyawarah Kampung Terbanggi Subing 2022.	73
Gambar 10. Berita Acara Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung Terbanggi Subing 2022.	74
Gambar 11. Berita Acara Musyawarah Kampung Terbanggi Subing 2022.	75
Gambar 12. Anggaran Pendapatan Belanja Desa Terbanggi Subing.	76
Gambar 13. Surat Keterangan dari Desa Telah Melakukan Penelitian.	79
Gambar 14. Surat Pra-Riset.	80

I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal dan tidak akan berjalan sesuai rencana. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Dalam sebuah program pembangunan Desa, baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya, partisipasi masyarakat harus diikutsertakan didalamnya demi kebutuhan bersama. Segi positif dari perencanaan partisipasi masyarakat dapat mendorong munculnya keterlibatan emosional terhadap program-program yang telah direncanakan. Penyertaan masyarakat dalam subjek pembangunan adalah suatu upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Ini berarti masyarakat diberikan peluang untuk berperan aktif dalam pembangunan dan memberikan peluang luas kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akanmensejahterakan mereka.

Adanya sebuah pembanguan tidak lepas dari adanya peran serta masyarakat untuk ikut ambil peran di dalamnya. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dalam

pembangunan adalah dimana terlibatnya masyarakat Desa dalam sebuah pembangunan Desa dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah Peraturan Desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran Desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes dibuat berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh sebuah Desa untuk melakukan sebuah pembangunan. Secara garis besar, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dapat dijelaskan bahwa Peraturan Desa, termasuk APBDes, ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

APBDes ini menjadi acuan teknik pelaksanaan program pembangunan yang akan direalisasikan. APBDes merupakan instrumen penting yang menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat Desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban. Proses penyusunan APBDes berbasis partisipatif yang dimaksud adalah dengan melibatkan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran Desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. Sebagai cerminan kemandirian desa, APBDes ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten, namun prioritas masing-masing desa dapat berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil masing-masing desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan menjadikan APBDes yang partisipatif.

APBDes adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Sebagai pemegang otonomi asli, desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan

pembangunan desa dengan dibingkai APBDes. Fungsi kontrol sangat penting untuk melihat sejauh mana transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam proses pengelolaan APBDes pemerintah desa jarang melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga keterlibatan masyarakat dalam penyusunan APBDes tersebut kurang. Pemerintahan Desa Terbanggi subing banyak mengalami masalah dalam penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes) masyarakat umumnya tidak memperoleh informasi secara transparan bagaimana penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes dilaksanakan.

Pemerintah Desa Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sebagai pemerintahan desa lebih berfungsi melindungi adat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melaksanakan keberlanjutan menuju pelaksanaan pembangunan melalui rencana keuangan tahunan yaitu APBDes. Partisipasi masyarakat merupakan modal dasar bagi pembangunan sebuah desa. Untuk itu, peran serta masyarakat dalam berpartisipasi sangat penting dalam mendukung percepatan pembangunan melalui rencana keuangan APBDes tahunan.

APBDes merupakan bentuk tanggung jawab pemerintahan Desa kepada masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang dibiayai selama satu tahun anggaran. Oleh karena itu menjadikan penting, makna partisipasi masyarakat yang merupakan pilar penting dalam teori demokrasi selain persamaan dalam pemilihan umum, keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan, persamaan hak pilih bagi semua orang dewasa. Hal ini sejalan dengan konsep governance yang memberikan kesempatan kepada *stakeholder* lain di luar pemerintah untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik. Sebagai alat kebijakan anggaran bisa dipakai pemerintah untuk melakukan intervensi di banyak sektor yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dengan demikian anggaran bisa berdampak menguntungkan maupun merugikan pada semua dimensi kehidupan masyarakat.

Namun, dalam prakteknya partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes belum berjalan dengan baik. Masalah tersebut mulai dari prosedur hingga praktek dan proses penganggaran itu sendiri, artinya hampir bisa dikatakan bahwa penganggaran adalah proses yang tidak partisipatif. Bahwa dari sisi masyarakat ada situasi yang menjadi kendala untuk berpartisipasi dalam penganggaran, antara lain:

1. Kurangnya informasi yang diberikan oleh Pemerintah desa
2. Pemahaman masyarakat masih kurang mengenai apa itu APBDes
3. Masyarakat umumnya tidak memperoleh informasi secara transparan bagaimana penyusunan APBDes dilaksanakan

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya proses pengambilan keputusan berkaitan dengan proses pembangunan di daerah harus melibatkan masyarakat sebagai bagian dari warga negara. Musyawarah Rencana Pembangunan yang dilaksanakan secara bertingkat mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten sejatinya dilaksanakan demi mengakomodir aspirasi masyarakat di bidang pembangunan. Oleh karena itu, pentingnya makna partisipasi masyarakat yang merupakan pilar penting dalam teori demokrasi selain kesetaraan dalam pemilihan umum, keterlibatan dalam proses pembuatan kebijakan, dan kesetaraan hak pilih untuk semua orang dewasa.

Hal ini sejalan dengan konsep governance yang memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan lain di luar pemerintah untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik. Sebagai alat kebijakan anggaran, pemerintah dapat menggunakannya untuk mengintervensi berbagai sektor yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, anggaran dapat memberikan dampak yang menguntungkan maupun merugikan bagi seluruh dimensi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimana PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (STUDI DI TERBANGGI SUBING KECAMATAN GUNUNG SUGIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemikiran bagi kajian Ilmu Pemerintahan terutama kajian dibidang pemerintahan desa.
2. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi pemerintah Desa Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Partisipasi

2.1.1 Definisi Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa latin *partisipare* yang mempunyai arti mengambil bagian atau turut serta. Sastrodipoetra dalam Arif (2012:45) menyatakan partisipasi sebagai keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 31-32), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah kesadaran seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta mengambil bagian dalam suatu kegiatan yang didasarkan oleh perasaan tanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk materi maupun non materi demi mewujudkan tujuan bersama. Partisipasi membutuhkan orang-orang yang secara sukarela memberikan sumbangsuhnya terhadap usaha pembangunan.

2.2 Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat

2.2.1 Definisi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan, keterlibatan seluruh anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung atau tidak langsung dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Masyarakat menjadi pihak yang paling aktif dalam mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program yang telah disusun bersama. Partisipasi masyarakat akan tercipta apabila terjadi kerjasama yang baik dan rasa saling percaya antara pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan yang ada atau dengan anggota masyarakat.

Conyers dalam Damsar (2016:240-241) mengungkapkan pentingnya partisipasi sebagai berikut: pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, masyarakat akan mempercayai program pembangunan jika mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui tentang proyek tersebut sehingga menimbulkan rasa memiliki terhadap program tersebut; ketiga, timbulnya anggapan bahwa partisipasi merupakan suatu hak demokrasi apabila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Menurut Raharjo (1989) dalam Purnomo (2015) terdapat tiga unsur penting partisipasi yaitu kesadaran, kemampuan dan kesempatan. Kesadaran merupakan sumber motivasi, namun masih harus di dukung oleh kemampuan. Kemampuan disini adalah kemampuan dalam bidang teknis, manajemen dan organisasi. Dengan kemampuan tersebut, kelompok dapat mencari kesempatan yang diciptakan berdasarkan gagasan yang rasional praktis. Kemudian mengorganisasikan sumber dan faktor

produksi yang tersedia di masyarakat. Berdasarkan prinsip tersebut partisipasi di masyarakat dapat berjalan.

2.2.2 Jenis-Jenis Partisipasi Masyarakat

Menurut Cohen dan Uphoff (dalam Jurnal Isma Rosyida dan Tonny Nasdian 2011) membagi partisipasi ke beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud disini yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan suatu program. Partisipasi dalam bentuk ini berupa pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menilai suatu keputusan atau kebijaksanaan yang sedang berjalan. Partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah proses dimana prioritas-prioritas pembangunan dipilih dan dituangkan dalam bentuk program yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Dengan mengikut sertakan masyarakat secara tidak langsung mengalami latihan untuk menentukan masa depannya sendiri secara demokratis. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini bermacam- macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.
2. Tahap pelaksanaan yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan

dengan perencanaan, pelaksanaa, maupun tujuan. Dalam pelaksanaan program, saat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu meliputi; pertama, menggerakkan sumber daya dan dana. Kedua, kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga penjabaran program. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu program merupakan suatu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri.

3. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi Pembangunan. Menurut Winarno (dalam jurnal Khairul Amri 2015) terdapat 5 indikator dalam evaluasi program yaitu sasaran kebijakan, diluar kebijakan, kondisi, pembiayaan langsung dan tidak langsung.
4. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat program dirasakan, berarti program tersebut berhasil mengenai sasaran. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Menurut Sastropoetro (Agnes dkk, 2016 : 148-151) menyebutkan jenis-jenis partisipasi yaitu partisipasi pikiran (Psychological participation), partisipasi tenaga (Physical participation), partisipasi keahlian (Participation

with skill) yaitu:

1. Partisipasi Pemikiran

Partisipasi masyarakat dalam pemikiran baik itu secara langsung maupun tidak langsung mutlak diperlukan bagi tercapainya tujuan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Terutama di zaman reformasi saat ini, dimana Masyarakat turut andil dalam kegiatan pembangunan, mulai dari penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tetapi, bagi suatu pembangunan strategi perencanaan yang baik akan menghasilkan pembangunan yang dapat dinikmati seluruh elemen masyarakat. Partisipasi masyarakat dengan pemikiran merupakan jenis partisipasi yang diberikan masyarakat dengan bentuk memberikan pendapat yang konstruktif, gagasan, usulan, dan kritik.

2. Partisipasi Tenaga

Selain partisipasi dalam bentuk pemikiran, tenaga merupakan salah satu bentuk partisipasi dari masyarakat desa yang sangat potensial diarahkan dalam proses pembangunan desa, khususnya pada perencanaan pembangunan desa dalam hal penyusunan anggaran pendapatan belanja desa. Partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.

3. Partisipasi Keahlian

Partisipasi Keahlian yaitu menyelesaikan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien serta berkualitas selain itu tingkat keahlian atau skill sangat dibutuhkan oleh para pekerjanya. Keahlian tersebut juga harus ditunjang pula dengan motif dan keadaan dari para pekerja pada saat mereka bekerja. Hal ini penting dikemukakan mengingat partisipasi adalah keterlibatan atas dasar kesukarelaan yang akan mewujudkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Dalam menjalankan program pengembangan masyarakat, adanya keterlibatan masyarakat dalam memberikan keahliannya merupakan hal yang perlu diwujudkan untuk kelancaran program. Bukan hanya karena partisipasi keahlian dari masyarakat dapat membantu berjalannya program, tapi dengan menyumbangkan keahlian atau keterampilan untuk mendukung berjalannya

program, masyarakat juga dapat berlatih memanfaatkan keahlian dan keterampilan yang mereka miliki sehingga potensi yang mereka miliki pun dapat terberdayakan.

2.2.3 Faktor Faktor yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat

Menurut Damsar (2016:235-240) faktor yang memengaruhi orang partisipasi adalah:

1. Faktor status sosial ekonomi (SSE), faktor ini merujuk kepada keadaan yang melekat pada diri seseorang baik karena diusahakan maupun diwariskan misalnya pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan kekayaan.
2. Faktor sosial budaya, faktor ini memengaruhi seseorang untuk ikut serta dalam kegiatan publik antara lain kepemimpinan, stratifikasi sosial, dan adat istiadat.
3. Faktor lingkungan, faktor ini merupakan faktor ekstra sosilogis yang berasal dari luar masyarakat yang terdiri dari keterisoliran daerah dan cuaca.

Menurut Astuti (2011) dalam Purnomo (2015) faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat antara lain:

- a. Sifat malas, apatis, masa bodoh, dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat;
- b. Aspek-aspek tipologi (perbukitan dan jurang);
- c. Geografis (pulaupulau kecil yang tersebar letaknya);
- d. Demografis (jumlah penduduk);
- e. Ekonomi (desa miskin/tertinggal).

Menurut Plumer (dalam Yulianti,2012:10), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

- a. Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap- tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada

- b. Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi
- c. Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada
- d. Jenis kelamin. Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan; . Kepercayaan terhadap budaya tertentu.
- e. Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep- konsep yang ada. faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

2.3 Pemerintahan Desa

2.3.1 Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan dalam pasal 371 ayat (1) bahwa “Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa”. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa “Pemerintahan

Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dimulainya masa reformasi terjadilah perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sentralistik-militeristik ke pemerintahan reformis yang demokratis.

Pada 2004 UU No. 22 Tahun 1999 diganti UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Baik UU No. 22 Tahun 1999 maupun UU No. 32 Tahun 2004 menganut prinsip-prinsip demokratis, partisipasi masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan keanekaragaman. UU No. 32 Tahun 2004 menetapkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Mengatur artinya kewenangan membuat kebijakan yang bersifat mengatur (*policy regulation*), sedangkan mengurus artinya kewenangan membuat aturan (*policy implementation*) (Nurcholis, 2011).

Berbicara mengenai kewenangan desa terdapat perubahan yang mendasar dari pengaturan desa dalam UU No. 32 Tahun 2004 menjadi UU No. 6 Tahun 2014. Kewenangan desa dalam UU No. 32 Tahun 2004 lebih mengatur kepada urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dari pemerintahan atasan. Desa hanya dianggap sebagai objek dari pemerintah atasan, karena desa tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola desanya secara mandiri. Berbeda dengan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 19 yang memberi desa kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa. Dalam UU ini desa diberi kepercayaan untuk mengatur dan mengurus desanya sendiri secara mandiri tanpa perlu dibebani lagi berbagai tugas dan urusan pemerintahan atasan yang terkadang memberatkan desa sendiri (Suharsono, 2015:332).

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengembangkan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. UU Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tetapi halaman depan Indonesia. UU Desa ini juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azasrekognisi dan subsidiaritas desa. Undang-undang ini mengangkat hak serta kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan.

Undang-undang Desa yang baru menempatkan desa sebagai subjek pembangunan dengan menjadikan pemerintah desa sebagai pihak yang memfasilitasi kemandirian dan kesejahteraan desa. Desa menjadi subjek pembangunan yang dikuatkan dengan anggaran sekitar Rp 1 miliar, sehingga desa dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya sebagai upaya untuk memajukan kemakmuran desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan visi dan misi perencanaan pembangunan nasional 2015-2019 yang bersumber pada Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang menghendaki terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri danberkepribadian berlandaskan gotong royong.

2.3.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Nurcholis (2011, 73-79) menyatakan penyelenggara pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti:

1. Pemerintah Desa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) yang mengatakan tugas kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dapat diinterpretasikan bahwa kepala desa diberi keleluasaan yang cukup melaksanakan tugasnya dibidang pengaturan sebelumnya yang hanya menempatkan kepala desa sebagai pelaksana saja.

Kepala Desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa memiliki wewenang antara lain (Nurcholis, 2011:74):

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
2. Mengajukan rancangan peraturan desa;
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
5. Membina kehidupan masyarakat desa;
6. Membina perekonomian desa;
7. Mengoordinasikan pembangunan desa partisipatif;

Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu pemerintah desa dan BPD. Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Atas fungsi tersebut, BPD mempunyai wewenang antara lain: Kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang diangkat oleh sekretaris.

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan yang di dasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat diangkat/diusulka kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Pimpinan BPD terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu sekretaris. Pimpinan BPD dipilih oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan menjadi kepala desa dan perangkat desa.

2.4 Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan Belanja Desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanjaprogram dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desayang output-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaanya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa tahun berjalan

Pemerintah wajib membuat APBDesa melalui ABDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggaranya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggaranya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. tanpa APBDesa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

2.4.1 Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggara pemerintahan desa yang output-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dituangkan dalam APBDesa inilah terlihat apa yang dikerjakan pemerintah desa dalam satu tahun berjalan (Nurcholis, 2011:83). Nurcholis(2011:83-84) mengemukakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri atas:

2.4.2 Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas: (1) pendapatan asli desa (PADesa); (2) bagi hasil pajak kabupaten/kota; (3) bagian dari retribusi kabupaten/kota; (4) alokasi dana desa (ADD); (5) bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan desa lainnya; (6) hibah; (7) sumbangan pihak ketiga.

2.4.3 Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri :

1. Belanja langsung yang terdiri atas: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.
2. Belanja tidak langsung yang terdiri atas: belanja pegawai/penghasilan tetap, belanja subsidi, belanja hibah (pembatasan hibah), belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.

2.4.4 Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas:

1. Penerimaan pembiayaan, yang mencakup:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya;
 - b. pencarian dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman.
2. Pengeluaran pembiayaan yang mencakup:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal desa;
 - c. pembayaran utang.

Pemerintah Desa wajib menyusun APBDesa setiap tahunnya. APBDesa merupakan rencana pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Program tersebut diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). RPJMDesa merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa terpilih (Nurcholis, 2011:84).

Asas umum yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBDesa adalah sebagai berikut (Aji, 2014:13-1).

- a. Tertib yaitu APBDes harus dikelola dengan tepat waktu dan tepat guna yang di dukung yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Taat pada peraturan perundang-undangan berarti bahwa pengelolaan APBDes harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada.

- c. Efektif merupakan pencapaian hasil program sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- d. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan yang terendah.
- e. Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah.
- f. Transparan merupakan prinsip keterbukaan dari pemerintah desa yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang APBDes.
- g. Bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
- h. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- i. Kepatutan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Menurut moh.mahsun 2019 menjelaskan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam penganggaran antara lain:

1. Tahap Persiapan
2. Tahap Penyusunan
3. Tahap Ratifikasi (Pengesahan)

Tahapan tersebut merupakan urutan-urutan seri tugas yang saling berhubungan dan diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Prosedur ini biasanya terdiri dari bagan alur (flowchart), formulir, dan uraian tugas yang ditetapkan dalam standard operating procedures (SOP) organisasi, seperti berikut:

1. Tahap Persiapan

Anggaran yang akan dibuat pada tahun yang akan datang sebaiknya disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai. Dengan demikian anggaran yang dibuat dapat digunakan pada awal anggaran. Tahun anggaran biasanya dimulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun yang sama. Sebelum menyusun anggaran, lebih dahulu penyusunan anggaran melakukan 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Menetapkan rencana besar organisasi, seperti tujuan, kebijakan, asumsi sebagai dasar penyusunan anggaran,
- b. Membentuk panitia penyusunan anggaran yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.

2. Tahap Penyusunan

Adapun tahapan dalam penyusunan, yaitu:

- a. Menyusun rancangan rencana keuangan yang terdiri dari rencana pendapatan, rencana biaya (belanja) dan rencana pembiayaan,
- b. Melibatkan pihak-pihak terkait dengan bidang yang direncanakan.

3. Tahap Ratifikasi (Pengesahan)

Adapun tahapan dalam pengesahan, yaitu:

- a. Melakukan perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran,
- b. Melakukan koordinasi dan penelaahan setiap komponen anggaran,
- c. Mengesahkan dan mendistribusikan anggaran kepada pengguna anggaran.

4. Tahap Implementasi dan Pertanggungjawaban

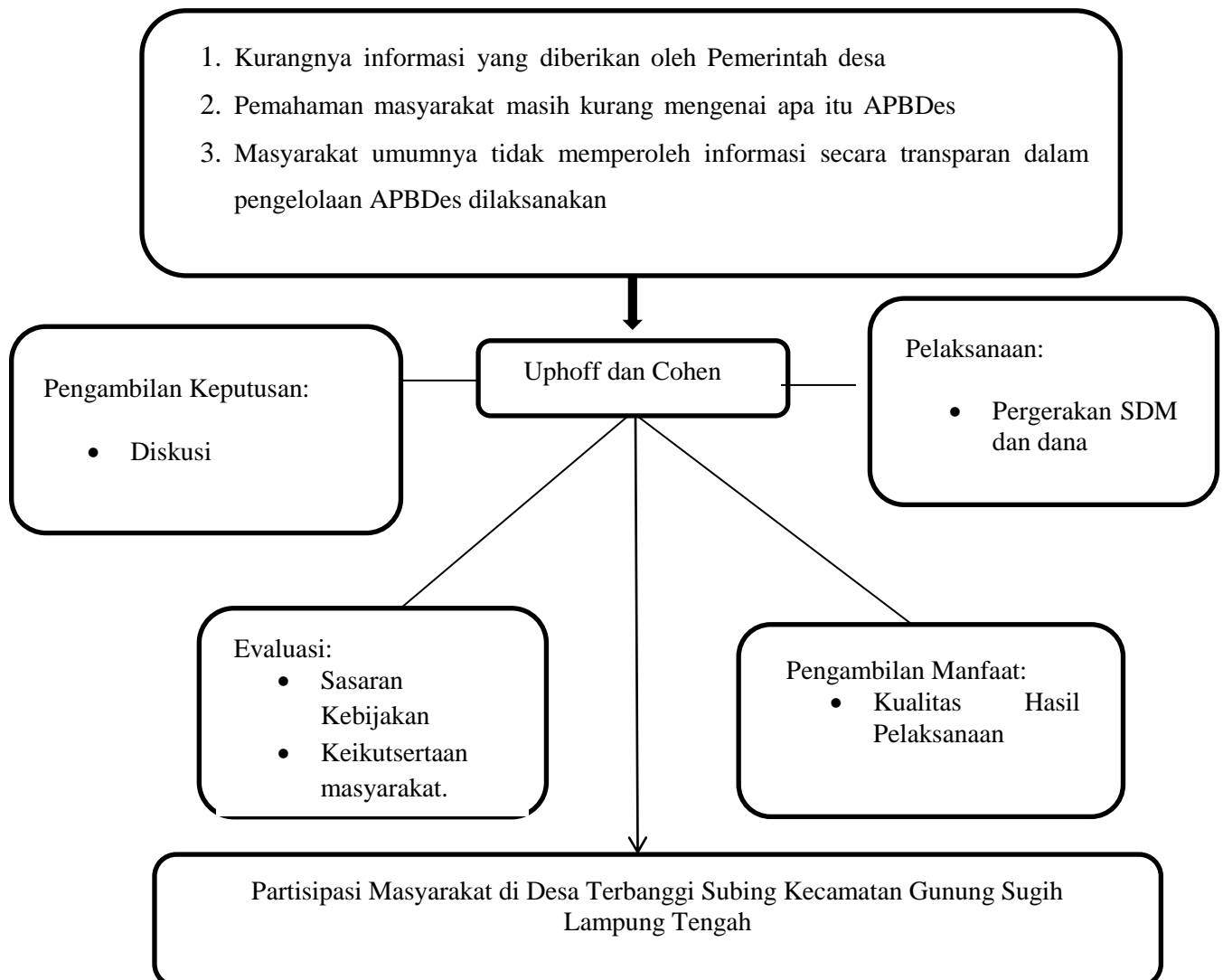
- a. Melaksanakan kegiatan / pekerjaan berdasarkan anggaran yang sudah disahkan.
- b. Menyusun laporan realisasi anggaran bagi setiap pengguna anggaran,
- c. Melakukan analisa variance (selisih) dan disampaikan ke pimpinan organisasi dan pihak terkait lainnya.

2.5 Kerangka Pikir

Penelitian ini membahas mengenai Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Dalam upaya menjawab permasalahan terkait Partisipasi Masyarakat peneliti menggunakan konsep yang dikemukakan oleh cohen dan uphoff (dalam Jurnal Isma Rosyida dan Tonny Nasdian 2011).

Sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh cohen dan uphoff (dalam Jurnal Isma Rosyida dan Tonny Nasdian 2011). terdapat 4 ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan suatu program , yaitu:

1. partisipasi dalam pengambilan keputusan
2. partisipasi dalam pelaksanaan
3. partisipasi dalam pengambilan manfaat
4. partisipasi dalam evaluasi



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan APBDes ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif karena melalui metodologi ini peneliti dapat memahami fenomena sentral yang ada di lapangan dengan pengumpulan data melalui interview, observasi sehingga dapat mencapai pemahaman yang mendalam.

3.2 Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisipokok masalah yang masih bersifat umum. Fokus penelitian secara umum adalah merupakan pemusatan konsentrasi terhadap sebuah tujuan atau objek yang dijadikan penelitian yang sedang di lakukan, Fokus penelitian harus diungkap secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melakukan sebuah observasi. Untuk mempertajam dan membatasi penelitian maka harus menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian untuk memilih sebuah data yang relevan dan data yang tidak relevan . Pembatas dalam penelitian Kualitatif terlebih didasarkan pada tingkat kajian yang akan diteliti.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung tengah Karena data ataupun dokumen-dokumen dapat diperoleh di Desa Terbanggi Subing dan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran harus terjun langsung ke Terbanggi Subing, penelitian ini direncanakan akan berlangsung satu bulan.

3.4 Informan

Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data disebut dengan informan, penentuannya tidak diambil secara random, tetapi diambil purposive dan snowball. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas pertimbangan tertentu. Pertimbangannya adalah orang yang menguasai informasi dari obyek yang diteliti. Snow ball sampling adalah sampel yang jumlahnya semakin lama semakin besar, tetapi juga dipilih secara purposive.

Tabel 1 Informan Peneliti.

No.	Nama	Pekerjaan
1	Puspa Dewi	Sekretaris Desa
2	Supardi	Kasi Pemerintahan
3	Kusdianto	Wakil BPK
4	Romian Purnama	Masyarakat
5	Parulian	Masyarakat
6	Lenny	Masyarakat

3.5 Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis data yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan peneliti setelah melakukan observasi dan wawancara. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan

wawancara langsung dengan narasumber berdasarkan panduan wawancara kepada perwakilan pihak pemerintah desa dan masyarakat

- b. Data Sekunder, yaitu data yang di peroleh dan di kumpulkan dari buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang ditulis oleh peneliti, antara lain adalah buku mengenai Partisipasi Masyarakat dan APBDes. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari sumber terkait dan dokumentasi Penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap yang penting dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data, teknikpengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Menurut Marshall (Sugiyono 2018:106) menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna perilaku tersebut. Menurut Spradley (Sugiyono 2018:110) obyek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi dinamakan ssituasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu:

- a. Tempat merupakan di mana interaksi dalam situasi sosial sedangberlangsung.
- b. Pelaku merupakan orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu
- c. Aktivitas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.

2. Wawancara

Wawancara tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara berdasarkan panduan wawancara yang telah dibuat. Panduan wawancara tersebut sebelumnya telah disusun berdasarkan fokus penelitian dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah peninggalan tertulis mengenai data berbagai kegiatan atau

kejadian dari suatu organisasi. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan cara mempelajari dan mencari dari beberapa sumber literatur buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini untuk melengkapi data.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah peneliti memperoleh data dari lapangan selanjutnya peneliti akan mengolah data yang telah didapatkan tersebut. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Editing data, yaitu mengolah data dengan meneliti ulang data yang telah diperoleh dari hasil wawancara serta dokumentasi dengan tujuan menghindari kekeliruan. Teknik editing data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyalin ulang hasil dari wawancara dengan informasi yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
2. Interpretasi data, adapun proses interpretasi atas hasil dari wawancarakepada informan, meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh dilapangan. Tahap ini dilakukan dengan menguraikan jawaban yang telah diberikan dari informan dalam bentuk deskriptif, peneliti menjabarkan berbagai data yang sebelumnya telah melewati berbagai proses editing dan kemudian dianalisis berdasarkan hasil wawancara, observasi serta dokumentasi.

3.8 Teknik Analisis Data

Bogdan (dalam Sugiyono 2018:130) menyatakan bahwa analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasilwawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman(Sugiyono 2018:133), yaitu:

1. Data Collection (Pengumpulan Data)

Kegiatan utama pada setiap penelitian ini adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau penggabungan ketiganya (triangulasi). Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui triangulasi data.

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Dikarenakan data yang diperoleh dari lapangan berjumlah cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono 2018:135).

3. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data adalah kumpulan data yang diperoleh yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Sedangkan menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2018:137) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data yang sebelumnya sudah direduksi melalui teks yang bersifat naratif.

4. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Dalam penelitian ini sebelumnya peneliti sudah mengumpulkan data dari hasil penelitian untuk ditarik kesimpulan. Selanjutnya peneliti mengolah data yang telah diperoleh tersebut. Agar tidak terjadi kesalahan dalam penarikan kesimpulan maka peneliti menganalisa data yang telah didapat dengan sebaik mungkin.

3.9 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian keabsahan data adalah salah satu poin penting yang harus diperhatikan, keabsahan data adalah validitas atau kebenaran data yaitu data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga validitas atau keabsahan data yang telah diperoleh kemudian disajikan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis triangulasi data/sumber, yaitu di sini peneliti mengecek kembali data yang telah diperoleh dari berbagai sumber, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang bersumber dari hasil wawancara yang kemudian di cek dengan melalui observasi, dan dokumentasi.

IV. GAMBARAN KAMPUNG DESA TERVBANGGI SUBING

1.1 Sejarah Desa Terbanggi Subing

Kampung Terbanggi Subing Berdiri berdasarkan Pemekarandani Kampung Terbanggi Agung Pada Tanggal 27 Agustus 1958 yang pada saat itu menjadi desa Persiapan yang di pimpin oleh seorang Kepala Desa yaitu AMIR RAJA PUTTING MARGA. Pada tanggal 12 Oktober 1959 resmi menjadi Desa Definitif sampai sekarang.

Kampung Terbanggi Subing merupakan pemekaran dari kampung Terbanggi Agung dimana kampung yang mekardari Kampung Terbanggi Subing selalu diawali dengan nama Tembnaggi dan yang menurunkan Sebagai nenek moyang orang terbanggi subbing adalah BETAN SUBING, maka nama terbanggi Subng di ambil dari Sejarahnya yaitu yang menurunkan orang Terbanggi Subing adalah BETAN SUBING. Sebelum terjadi Desa Terbanggi Subing sebutan Terbanggi Subing adalah Terbanggi tatay yang di ambil dari nama sesuai yang ada di Dusun I Kampung Terbanggi Subing adalah Sungai Tatay (Way Tatay). dibuat. Panduan wawancara tersebut sebelumnya telah disusun berdasarkan fokus penelitian dalam penelitian ini. Desa Terbanggi Subing sudah mengalami beberapa pergantian kepala desa, berikut urutan jabatan Kepala Desa Terbanggi Subing dari masa ke masa:

Tabel 2. Nama Kepala Desa Terbanggi Subing Per Periode

No.	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1.	Amir Raja Putting Marga	1958-1960
2.	Abdul Karim	1960-1966
3.	Amir Raja Putting Marga	1966-1972
4.	M. Sanusi	1972-1979
5.	Pangkat Adi Wiyono	1979-1987
6.	M. Ali Somad, TS	1988-2000
7.	Patulloh Ali KM, SE	2000-2007
8.	HI. M. Ali Somad, TS	2007-2013
9.	Sopan Putra	2013-2019
10.	Patulloh Ali KM, SE	2020- Sekarang

Sumber: Dokumen Desa Terbanggi Subing, diolah oleh peneliti 2022

1.2 Keadaan Geografis Desa Terbanggi Subing

Adapun keadaan geografis Desa Terbanggi Subing, seperti

1. Letak dan Batas Wilayah

Kampung Terbanggi Subing merupakan salah satu dari 11 Kampung di Wilayah Gunung Sugih. yang terletak 7 KM kearah Selatan dari Ibu Kota Kecamatan Kampung Terbanggi Subing Mempunyai Luas Wilayah Seluas 1,050 Ha.

Batas Wilayah Kampung Terbanggi Subing adalah:

Sebelah Utara : Kampung Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih

Sebelah Selatan : Kampung Bulusari Kecamatan Bumiratu Nuban

Sebelah Barat : Kampung Woosari Kecamatan Gunung Sugih

Sebelah Timur : Kampung Sidowaras Kecamatan Bumiratu Nuban

2. . Luas Wilayah

Luas Wilayah Kampung Terbanggi Subing adalah sebesar 1.050Ha, yang terdiri dari 9 dusun serta 38 wilayah RT.

3. Orbitasi

Orbitasi atau jarak dari pusat-pusat pemerintahan adalah:

- | | |
|--|----------|
| a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | : 7 km |
| b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten | : 7 km |
| c. Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi | : 52 km |
| d. Jarak dari Pusat Pemerintahan Pusat | : 308 km |

4. . Karakteristik Kampung

Kampung Terbanggi Subing merupakan kawasan perdesaan yang bersifat agraris dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam terutama pada sektor pertanian dan perkebunan. Sumber Daya Alam yang terdapat di Kampung Terbanggi Subing, seperti: pertanian, peternakan, perkebunan. Sehingga karakteristik dan besaran peruntukan lahan Kampung Terbanggi Subing dapat dibagi menjadi: permukiman masyarakat, lahan pertanian, dan lahan perkebunan

1.2.1 Demografi dan Monografi Wilayah Administrasi Kampung Terbanggi Subing

1. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk total di Kampung Terbanggi Subing adalah 6,634 jiwa dengan sebaran di 9 wilayah dusun dan 38 wilayah RT, dengan rincian se bagai berikut:

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

Kampung	: Terbanggi Subing
Kecamatan	: Gunung Sugih
Kabupaten	: Lampung Tengah
Provinsi	: Lampung

Tabel 3. Sumber Daya Manusia Kampung Terbanggi Subing

No.	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	a. Penduduk dan Keluarga	3.407	Orang
	b. Jumlah Penduduk Perempuan	3.227	Orang
	c. Jumlah Keluarga	1940	Keluarga
2	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Pertanian	3.701	Orang
	b. Pertambangan dan Penggalan	-	Orang
	c. Industri Pengolahan (Kerajinan)	20	Orang
	d. Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Maakan	136	Orang
	e. Angkutan (Ojek)	13	Orang
	f. Pertukangan	75	Orang
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan)	404	Orang
3	Tenaga Kerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan		
	a. Lulusan S-1 ke atas	154	Orang
	b. Lulusan SLTA	692	Orang
	c. Lulusan SLTP	795	Orang
	d. Lulusan SD	419	Orang
	e. Tidak Tamat SD/Tidak Sekolah		
4	Rumah Tangga Miskin		
	a. Jumlah Kepala Keluarga RTM	733	KK
	b. Jumlah Pengangguran	87	Orang
	c. Jumlah Anak Putus Sekolah	41	Orang

Tabel 4. Jumlah Penduduk Per Dusun Kampung Terbanggi Subing

No.	Dusun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		L	P	L+P
1	Dusun 1	430	422	852
2	Dusun 2	410	412	822
3	Dusun 3	344	325	669
4	Dusun 4	399	343	742
5	Dusun 5	344	349	693
6	Dusun 6	332	285	617
7	Dusun 7	552	532	1084
8	Dusun 8	321	317	632
9	Dusun 9	375	242	617
		3.407	3.227	6.728

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis/Suku

No.	Jenis Etnis	Jumlah (Orang)
1	Lampung	528
2	Jawa	6.024
3	Sunda	12
4	Batak	70
5	Padang	
6	Yang Lainnya	

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah jenis etnis lampung, jawa, sunda, dan batak adalah benar 6.634 jiwa sesuai dengan jumlah penduduk keseluruhan.

b. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 2	13
2	Strata 1/D4	152
3	D 3	61
4	D 1/ D 4	43
5	SLTA Sederajat	1.398
6	SLTP Sederajat	1.998
7	SD Sederajat	2.136
8	Tidak Lulus	916
9	Tidak Sekolah	119
10	Buta Huruf	76
		6.012

a. Perekonomian Kampung

Secara umum, kondisi perekonomian kampung Terbanggi Subing di topang oleh beberapa mata pencaharian dan bidang kegiatan perekonomian Kampung atau masyarakat, sebagai berikut:

Tabel 7. Jenis Mata Pencaharian/Pekerjaan masyarakat kampung

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1.	Petani	1.123
2.	Buruh Tani	685
3.	Peternak	37

4.	Pedagang	143
5.	Montir	21
6.	Karyawan Swasta	130
7.	PNS/POLRI/ dan TNI	71
8.	Pengrajin	14
9.	Tukang	69
10.	Jasa Angkut	97
11.	Pengangguran (Umur Kerja)	97

Tabel 8. Jumlah Penduduk Kampung Terbanggi Subing Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (KK)
1.	Pra Sejahtera	832
2.	Sejahtera	375

b. Kondisi Kesehatan

Kondisi Kesehatan di Kampung Terbanggi disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Kondisi Sarana Prasarama Kesehatan Kampung terbanggi Subing

No.	Uraian	Jumlah
1.	Puskesmas Pembantu	-
2.	Posyandu	7
3.	Tempat Praktek Dokter	3
4.	Bidan	9
5.	Kader Posyandu	36

Tabel 10. Kondisi Penduduk Pengguna Air Minum Kampung Terbanggi Subing

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pengguna Sumur Gali	1.675
2.	Pengguna Mata Air	-
3.	Pengguna Sumur Bor	85
4.	Pengguna Embung	

c. Bidang Keagamaan

Dilihat dari keyakinan beragama penduduk Kampung Terbanggi Subing mayoritas adalah beragama islam. Jumlah pemeluk Agama dan Sarana Ibadah di Kampung Terbanggi Subing sebagai berikut:

Tabel 11. Jenis dan Jumlah Pemeluk Agama Kampung Terbanggi Subing

No.	Agama	Jumlah Pemeluk
1.	Islam	6.343
2.	Katolik	109
3.	Kristen Protestan	182
4.	Budha	-
5.	Hindu	-
6.	Konghucu	

Tabel 12. Jenis dan Jumlah Sarana Ibadah Kampung Terbanggi Subing

No.	Sarana Ibadah	Jumlah (Unit)
1.	Masjid	11
2.	Mushola	12

3.	Gereja	2
4.	Vihara	-
5.	Pure	

2.1 Kondisi Sarana Prasarana Kampung Terbanggi Subing

Pembangunan Sarana dan Prasaran Kampung Terbanggi Subing masih jauh dari lengkap, namun dari sejak Tahun 1958 dan berdiri sebagai Kampung Terbanggi Subing sudah ada hasil Pembangunan Sarana dan Prasarana untuk keberlangsungan Pemerintahan dan Kesejahteraan masyarakat Kampung Terbanggi Subing.

Adapun instansi atau program yang melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kampung Terbanggi Subing antara lain :

1. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Tengah
2. Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Tengah
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung tengah
5. Program RIS PNPM
6. Program Gerbang Sakay Sambayan

Tabel 13. Daftar Jenis dan Jumlah Sarana Prasaranan Terbangun di Kampung Terbanggi Subing

No.	Jenis Sarana Prasarana	Volume	Kondisi
1.	Jalan Aspal	350	80%
2.	Jalan Onderlah	3.6	
3.	Jalan Berbatu/Tanah	-	
4.	Jaringan Irigasi	1 Km	
5.	Sumur Bor	2	
6.	Gedung Posyandu	-	

7.	Puskesmas Pembantu	-	
8.	Embung	-	
9.	Pasar Kampung	1 Unit	

Sumber: Profil Kampung

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

Kampung : Terbanggi Subing

Kecamatan : Gunung Sugih

Kabupaten : Lampung Tengah

Provinsi : Lampung

Tabel 14. Sumber Daya Pembangunan

No.	Uraian sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalan	3.95	Km
	b. Jembatan	3	Unit
	c. Embung	-	Unit
	d. Jaringan Irigasi	1	Km
	e. Saluran Drainase	1.31	Km
2	Aset Sarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	2	Unit
	b. Gedung TK	3	Unit
	c. Gedung SD	3	Unit
	d. Gedung SMP	2	Unit
	e. Taman Pendidikan Alqur'an	8	Unit
3	Aset Sarana Kesehatan		
	a. Posyandu	7	Unit
	b. Poskesdes	-	Unit

	c. MCK	149	Unit
	d. Sarana Air Bersih	147	Unit
	e. Puskesmas Pembantu		Unit
4	Aset Sarana Ekonomi		
	a. Pasar Kampung	1	Unit
	b. Tempat Pelelangan Ikan		Unit
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah Kelompok Usaha	13	Unit
	b. Jumlah Kelompok Usaha yang Sehat	6	Unit

2.3.2 Daftar Pemerintahan Kampung Terbanggi Subing

Tabel 15. Daftar Nama Aparatur Pemerintahan Kampung Terbanggi Subing

No.	Nama	Jabatan
1	Patulloh Ali KM, SE	Kepala Kampung
2	Suhardi	Sekretaris Kampung
3	Supardi	Kepala Urusan Pemerintahan
4	Sopingi	Kepala Urusan Pembangunan
5	Muhyin	Kepala Urusan Keuangan
6	Lilis Suryani	Kepala urusan Kesejahteraan Masyarakat
7	Aminullah	Kepala Urusan Umum
8	Irawan Ali	Kepala Dusun 1
9	M. Ali Akbar	Kepala Dusun 2
10	Miswandi	Kepala Dusun 3
11	Suyanto	Kepala Dusun 4
12	Ngatijan	Kepala Dusun 5
13	Eryono	Kepala Dusun 6

14	Dimin	Kepala Dusun 7
15	Budiman	Kepala Dusun 8
16	Arif Yulianto	Kepala Dusun 9

2.3.3 Daftar Kelembagaan Kampung

Kelembagaan Masyarakat di Kampung Terbanggi Subing terdiri beberapa kelembagaan yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dari masyarakat Kampung Terbanggi Subing. Adapun Kelembagaan masyarakat di Kampung Terbanggi Subing sebagai berikut:

Tabel 16. Jenis dan Jumlah Kelembagaan Masyarakat Kampung Terbanggi Subing

No.	Jenis Kelembagaan	Jumlah
1.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	1
2.	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1
3.	Rukun Tetangga	38
4.	Karang Taruna	1
5.	Risma	9
6.	Kelompok Pengajian	12
7.	Kelompok Tani	38
8.	Gapoktan	2
9.	Linmas	31

Sumber: Profil Kampung 2020

Susunan Kepengurusan Kelembagaan Masyarakat di Kampung Terbanggi Subing sebagai berikut:

Tabel 17. Pengurus Kelembagaan BPK

No.	Nama	Jabatan
1	Mesiran	Ketua
2	Mistarudin	Wakil Ketua
3	Subandi	Sekretaris
4	Subari	Anggota
5	Subagio	Anggota
6	Abdullah	Anggota
7	Sukadi	Anggota
8	Kusdiyanto	Anggota
9	Sumarno	Anggota

Tabel 18 Pengurus Kelembagaan Rukun Tetangga (RT)

No.	Nama	Jabatan
1	Efendi	RT 1
2	eka Yuningsih	RT 2
3	Sidik Purnomo	RT 3
4	Sugiyanto	RT 4
5	Robi Anggarisna	RT 5
6	Ibnu Parwoko	RT 6
7	Junaidi	RT 7
8	Mukoli	RT 8
9	Jujur Saputra	RT 9
10	wagiran	RT 10
11	Sunarno	RT 11
12	Bastari	RT 12

13	Lasimin	RT 13
14	Mustofa	RT 14
15	Erawati	RT 15
16	Satiyem	RT 16
17	Tukidi	RT 17
18	Edi Yulianto	RT 18
19	Sumpeno	RT 19
20	Suroto	RT 20
21	Gunaan	RT 21
22	Nursalam	RT 22
23	Susilo Wiyadi	RT 23
24	Zainal Abidin	RT 24
25	Ponidin	RT 25
26	Suyanto	RT 26
27	Marjiyanto	RT 27
28	Sarimin	RT 28
29	Juiman	RT 29
30	Sularno	RT 30
31	Purwanto	RT 31
32	Warjo	RT 32
33	Ponidin	RT 33
34	Widi Mugianto	RT 34
35	Andi Trianto	RT 35
36	Pamuji Rahman	RT 36
37	Sunardi	RT 37
38	Ahmad Sobari	RT 38

Tabel 19. Pengurus Kelembagaan PKK

No.	Jabatan	Nama
1	Ketua	Kartini
2	Wakil Ketua	Komini
3	Sekretaris I	Pupa Dewi Aprilina
4	Sekretaris II	Lilis Suryani
5	Bendahara	Maryani
6	Ketua Pokja I	Ade Srri Ruswati
7	Anggota	Miyani
8	Anggota	Uthi Aditama
9	Anggota	Dewi Sriyani
10	Anggota	Roswati
11	Ketua Pokja II	Siti Patonah
12	Anggota	Supiyah
13	Anggota	Murtini
14	Anggota	Tri Suarti
15	Anggota	Murgiyati
16	Ketua Pokja III	Sukarsih
17	Anggota	Sesmiati
18	Anggota	Rubiatun
19	Anggota	Suparni
20	Anggota	Ani Muji Rahayu
21	Ketua Pokja IV	Puji Wahyuni
22	Anggota	Kristiani
23	Anggota	Ririn Agustina
24	Anggota	Munirah
25	Anggota	Erawati
26	Anggota	Sabrina Ulasmindar

Tabel 20. Pengurus Kelembagaan LPMK

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	HI. Ikhsan
2.	Sekretaris	M. Hatta
3.	Bendahara	Imam Rasidi
4.	Anggota	

Tabel 21. Pengurus Kelembagaan Karang Taruna

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Amal Ika Bayu Taruna, S.Pd
2.	Wakil Ketua	Usman Diharjo
3.	Sekretaris	Sularno
4.	Wakil Sekretaris	Zulyfa Tulaly
5.	Bendahara	Olfy Cahyaningrum
6.	Wakil Bendahara	Siti Aisah
7.	Anggota	Muda Mudi Kampung Terbanggi Subing

a. Visi Misi Kampung

VISI KAMPUNG TERBANGGI SUBING

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya maka kampung terbanggi subing mengacu pada visi pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yaitu:

Mewujudkan kampung terbanggi subing menjadi kampung yang mandiri berbasis agro bisnis melalui bidang pertanian perdagangan dan peternakan

MISI KAMPUNG TERBANGGI SUBING

1. Membangun Ekonomi Keraykatan melalui diversifikasi perekonomian

daerah Dengan mengemangkan industri berbasis pertanian.

2. Memanfaatkan teknologi untuk pembangunan daerah yang lebih kompetitif dan berwawasan lingkungan terutama teknologi pertanian.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, maka kampung Terbanggi Subing menetapkan Visi dan Misi Sebagai Berikut :

Terwujudnya Masyarakat Terbanggi Subing Yang Mandiri, Demokratis dan Handal dalam SDM serta menjadi Pusat Keunggulan Pertanian dan Peternakan untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dalam Pembangunan.

Misi.

- Meningkatkan Pendapatan dan kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan Produksi pertanian.
- Memberdayakan potensi Agroklimat secara optimal.
- Meningkatkan Sumber daya Manusia di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Meningkatkan Etos Kerja.
- Mendorong Kemandirian
- Meningkatkan kondisi kamtibmas

Sumber : RPJM KAMPUNG TERBANGGI SUBING

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penyajian, analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan tentang partisipasi masyarakat dalam desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Tahap pengelolaan berkaitan dengan penjangkaran aspirasi yang secara resmi dikoordinir oleh BPD Desa Terbanggi dilaksanakan melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa. Seluruh masyarakat dilibatkan di dalam musyawarah dusun. Sedangkan untuk musyawarah desa melalui beberapa perwakilan seperti ketua RT, ketua RW, dan tokoh masyarakat.

Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pengelolaan APBDes

a. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui perencanaan pembangunan yaitu masyarakat Desa Terbanggi Subing mampu berkontribusi dengan baik dan antusias dalam menyampaikan pendapatnya di forum musyawarah melalui perwakilan dari rt atau rw setempat, meskipun ada sedikit masyarakat yang kurang aktif dalam mengikuti rapat atau musyawarah desa, karena mereka menganggap kehadiran masyarakat pada rapat musyawarah tidak memiliki manfaat yang besar yang menyangkut kepentingan mereka sendiri.

b. Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan yang diberikan partisipan dalam membangun desa, Partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan APBDes, masyarakat

Desa Terbanggi Subing berkontribusi dengan tenaga, meskipun ada yang bersikap cuek karena menganggap sudah banyak yang membantu dan tidak adanya pemberitahuan dalam pelaksanaan seperti perbaikan jalan.

Terkait Pergerakan dana. Pembiayaan Program yang dilaksanakan murni dari APBDes, tidak ada iuran dari warga desa atau dari Bumdes sendiri. Kendala terkait dana dalam pelaksanaan program APBdes itu sendiri Perangkat terkait (Sekdes, Kasi Pemerintahan dan BPK) tidak ada kendala sedangkan dari masyarakat sendiri mengatakan kemungkinan tidak ada.

c. Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat

Partisipasi dalam pengambilan manfaat, penyusunan APBDesa untuk masyarakat desa yaitu masyarakat dapat merasakan jalan lintas yang tidak berlobang dan membuat masyarakat nyaman akan perubahan yang terjadi. Meskipun masih ada beberapa jalan yang dirasa harus segera di perbaiki. Selanjutnya menggunakan program bantuan langsung tunai tunai, yang merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Terbanggi Subing. Yang di harapkan program ini dapat di laksanakan secara merata.

d. Partisipasi Dalam Evaluasi

Pemerintah Desa Terbanggi Subing sendiri belum diadakannya musyawarah atau forum untuk evaluasi program dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang melibatkan masyarakat desa dan dari wawancara dengan Pejabat desa bahwa evaluasi ini tidak adanya partisipasi dari masyarakat..

6.2 Saran

Adapun saran yang bisa dilakukan untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Perlu adanya partisipasi dari pemerintah desa kepada masyarakat untuk mengajak serta mengarahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
2. Perlu adanya kepastian Informasi agar setiap masyarakat mendengar hal yang ingin di kerjakan atau informasi mengenai pembangunan.
3. Perlu dilakukannya penguatan kelembagaan desa RT agar dapat menyalurkan informasi kepada masyarakat.
4. Perlu di adakannya transparansi biaya pembangunan dengan membuat banner atau poster terhadap objek yang di bangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes, D. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Empirika*.
- Arif, S. (2012). *Peranan Partai Politik Dalam Meingkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu dan Pilkada*. Malang: Averroespress.
- Asasandi, A. M. (2019). Partisipasi Masyarakat Desa Belanting Dalam Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa. *Ganec Swara*.
- Astuti, S. I. (2009). *Desentralisasi Dan Partisipasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: UNY.
- Damsar, I. &. (2016). *Pengantar Sosiologi Perdesaan*. Jakarta: Kencana.
- Erwandi, A. (2018). Peranan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Untuk Melestarikan Budaya Masyarakat di Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian Kanputen Sintang. *Angewandte Chemie International Edition*.
- Mahsun, M. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Moeljono, M. (2019). Musrenbang Acara Ceremonial Atau Penyerapan Aspirasi (Studi Kasus Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa di Desa Tegal Arum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa tengah. *Solusi*, 17-38.
- Nasdian, I. R. (2011). Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Purnomo, A. T. (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Wisata di desa Limbasari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Yahya, M. &. (2018). Realisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa. *Bongaya Journal For Research in Management (BJRM)*, 45-55.

Yulianti, Y. (2012). *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan*. Padang: Universitas Andalas.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa

Peraturan Kampung Terbanggi Subing Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung Terbanggi Subing Periode 2021-2026

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.